

USCIRF—RECOMMENDED FOR SPECIAL WATCH LIST

U.S. Commission on International Religious Freedom (Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, USCIRF) adalah komisi independen dan bipartisan pemerintah federal AS yang memantau hak universal untuk kebebasan beragama atau keyakinan di luar negeri. Dibentuk dengan Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional 1998 (IRFA), USCIRF berpijak pada standar internasional untuk memantau pelanggaran kebebasan beragama atau kepercayaan di luar negeri dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada presiden, menteri luar negeri, dan Kongres. USCIRF adalah badan independen yang terpisah dan berbeda dengan Departemen Luar Negeri AS. Laporan Tahunan 2020 ini merupakan puncak kerja satu tahun oleh Komisaris dan staf profesional untuk mendokumentasikan pelanggaran di lapangan serta menyusun rekomendasi kebijakan independen bagi pemerintah AS. Laporan Tahunan 2020 mencakup periode dari Januari 2019 hingga Desember 2019, meskipun beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum atau setelah kurun waktu ini juga tercakup. Untuk informasi selengkapnya tentang USCIRF, lihat situs web-nya [di sini](#), atau hubungi USCIRF langsung di 202-523-3240.

TEMUAN UTAMA

Pada tahun 2019, kondisi kebebasan beragama di Indonesia umumnya cenderung negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan-laporan dari LSM lokal menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur mencatat [jumlah insiden tertinggi](#) termasuk diskriminasi, ujaran kebencian, tindak kekerasan, dan penolakan izin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah bagi penganut agama minoritas. Pemerintah masih terus mengadili tuduhan penistaan agama dan menjatuhkan hukuman penjara yang tidak proporsional. Tiga wanita diadili karena penistaan agama, [dua](#) ditetapkan menderita gangguan kesehatan mental dan satu karena komentar yang di-posting di media sosial. Suzethe Margaret, seorang Katolik Roma yang didiagnosis menderita skizofrenia paranoid, ditahan pada 30 Juni 2019, karena memasuki masjid dengan membawa anjingnya. Pada bulan September, setelah tekanan selama berbulan-bulan dari kelompok Muslim garis keras, pihak berwenang mengumumkan bahwa yang bersangkutan akan diadili karena penistaan agama. Pada tanggal 5 Februari 2020, setelah masa wajib lapor, Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, membebaskan Suzethe dari tuduhan penistaan agama karena gangguan mental. Pada bulan April, Mahkamah Agung [menolak permohonan banding](#) Meliana, seorang wanita Buddha yang didakwa karena penistaan agama pada tahun 2018 karena meminta sebuah masjid setempat menurunkan volume azan. Namun, pada bulan Mei, Meliana [dibebaskan bersyarat](#). Ustadz Abdul Somad juga [diselidiki karena penistaan](#) setelah ceramahnya di mana ia menghinakan salib Kristen, meskipun ia tidak secara resmi didakwa.

Kelompok garis keras dan kelompok-kelompok intoleran lainnya terus mengancam rumah ibadah yang terkait dengan kepercayaan minoritas, termasuk dengan mengeksploitasi SKB 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, yang mengharuskan masyarakat beragama tertentu mendapatkan tanda tangan 90 anggota jemaat dan setidaknya 60 KK setempat dari agama berbeda, dan mendapat persetujuan pemerintah setempat sebelum membangun rumah ibadah. Pada Mei 2019, kelompok garis keras [memprotes](#)—dan dilaporkan mengancam jihad—atas rencana pembangunan kuil Hindu di

Bekasi. Pada bulan Juli, setelah kelompok garis keras mendemo dan mengancam kekerasan, pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, [menerbitkan](#) surat keputusan tahun 2006 tentang pembatalan izin pembangunan gereja Pentekosta. Dalam sengketa yang berlangsung sejak 2008, gereja GKI Yasmin masih belum mendapat izin untuk rumah ibadatnya di Bogor, meskipun [dijanjikan](#) oleh pejabat setempat dan menang di Mahkamah Agung.

Ada laporan-laporan bahwa para oportunist politik berusaha mengeksploitasi isu agama untuk memperoleh dukungan menjelang pemilihan umum pada 17 April 2019. Prabowo Subianto, penantang utama Presiden Joko Widodo, berupaya [memobilisasi pendukung](#) gerakan 212, yang memainkan peran kunci dalam menekan pemerintah untuk menuntut gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama—seorang warga Tionghoa Kristen—dengan penistaan pada awal tahun 2017. Setelah Presiden Jokowi terpilih kembali, ada laporan bahwa pemerintah [berencana memberlakukan](#) pemeriksaan latar belakang lebih ketat untuk identifikasi dan membersihkan birokrasi dari ekstremis agama. Pada bulan November, pemerintah [meluncurkan](#) situs web di mana warga masyarakat dapat melaporkan dugaan “konten radikal” yang dibagikan oleh pegawai negeri secara online. Kementerian Ketenakerjaan dan Reformasi Birokrasi [melarang PNS](#) memakai jilbab bercadar. Pada bulan Oktober, Menkopolkam [ditikam](#) oleh orang yang diduga sebagai Islamis yang dipengaruhi ISIS.

Pada bulan September 2019, DPR mempertimbangkan RUU untuk menggantikan KUHP yang ada, yang berasal dari era kolonial Belanda. UU baru ini dipastikan akan [memperluas](#) tuduhan kriminal penistaan untuk mencakup penghinaan terhadap pemuka agama dalam khotbah-khotbah agama, seruan menjadi ateis, dan menodai atau menghancurkan sejumlah rumah ibadah atau artefak agama secara melanggar hukum. Kelompok masyarakat madani memimpin protes besar dalam kaitan ini dan usulan pembatasan lainnya, sehingga pemerintah terpaksa menunda RUU hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH AS

- Memasukkan Indonesia dalam Daftar Pengawasan Khusus Departemen Luar Negeri AS karena terlibat dalam atau mentolerir pelanggaran berat kebebasan beragama menurut Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA);
- Mendesak pemerintah Indonesia merevisi rancangan RUU KUHP dan menghapus sanksi pidana penistaan agama, dan mencabut atau mengubah UU penistaan agama yang ada dan bebaskan semua orang yang saat ini ditahan karena tuduhan penistaan agama;
- Menyertakan pelatihan standar hak asasi manusia internasional terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan—termasuk kekhawatiran terkait penegakan hukum penistaan agama—dalam program yang didanai AS, seperti proyek Harmoni dan MAJu dari Badan Pembangunan Internasional AS (USAID); dan
- Mendesak pemerintah Indonesia untuk memelopori hak asasi manusia dan kebebasan beragama di tingkat regional dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggot Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN, termasuk pemberian advokasi publik bagi masyarakat Uighur dan Muslim yang dianiaya lainnya di Tiongkok.

Kongres AS harus:

- Mendukung langkah seperti [H.Res.512](#) dan [S.Res.458](#), yang mendesak dicabutnya hukum penistaan agama, bidah, dan kemurtadan.

SUMBER DAYA UTAMA & AKTIVITAS USCIRF

- **Pembaruan Kebijakan:** [Tuduhan Penistaan Agama di Indonesia yang Terpolarisasi](#)
- **Op-Ed:** [Indonesia Harus Mencegah Konflik Agama, tetapi Hukum Penistaannya Lebih Banyak Mudarat dari Manfaatnya](#) (dalam The Globe Post)
- **Pernyataan Pers:** [USCIRF Menyambut Pembebasan Mantan Gubernur Jakarta: Mengecam UU Penistaan Agama di Indonesia](#)

Latar Belakang

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Muslim [mewakili](#) 87,2 persen dari 267 juta penduduk Indonesia, sementara Kristen Protestan terdiri dari 7 persen, Katolik Roma 2,9 persen, dan Hindu 1,7 persen; 0,9 persen diidentifikasi sebagai agama minoritas lainnya, seperti Buddha dan Kong Hu Cu. Indonesia memiliki tradisi panjang pluralisme agama. Pasal 29 dari UUD 45 “menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Pemerintah Indonesia menjunjung ideologi yaitu Pancasila, yang terdiri dari lima dasar: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial (“ketuhanan yang maha esa” secara luas didefinisikan sebagai agama apa pun yang bertuhan, tokoh suci, kitab suci, dan ritual yang jelas). Namun, pemerintah secara resmi hanya mengakui enam agama: Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Pelanggaran kebebasan beragama cenderung memiliki dampak terbesar pada Ahmadiyah dan Syiah, Kristen, kepercayaan di luar enam agama resmi, dan orang-orang tak beragama.

Pemerintah juga mewajibkan semua warga negara mendaftarkan afiliasi keagamaannya di KTP, yang secara historis memaksa

anggota komunitas agama minoritas yang tidak diakui, dan yang tidak memeluk agama, untuk menuliskan agama mereka secara keliru atau membiarkan kolom agama kosong. Ini dapat berdampak saat mengurus perizinan, pendidikan, dan melamar pekerjaan di pemerintah. Pada bulan Februari 2019, Bandung, Jabar, menjadi [daerah pertama](#) di Indonesia yang memberikan sebutan “Faith in One God” bagi anggota masyarakat agama adat.

Hukum Syari’ah di Aceh

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki otoritas hukum untuk memberlakukan hukum Syariah. Polisi agama [menegakkan](#) hukum Syari’ah yang ketat termasuk hukuman fisik. Pada Januari 2019, dua anak berusia 18 tahun [dihukum cambuk](#) 17 kali karena saling berpelukan di depan umum dan seorang pria dicambuk karena berzina dengan seorang wanita di sebuah warung. Pada bulan Desember, dalam dua kasus terpisah, seorang pria dan wanita didakwa berzina [dipukul hingga pingsan](#) di hadapan publik. Pemerintah provinsi melarang wanita mengendarai sepeda motor dan memaksa mereka mengenakan jilbab. Umat Islam Aceh tidak punya pilihan untuk memilih keluar dari sistem hukum Syariah.

Ekstremisme di Lembaga Pendidikan

Beberapa kelompok hak asasi manusia setempat [mengklaim](#) bahwa mahasiswa Indonesia semakin teradikalisasi. Sebuah studi Kementerian Pertahanan yang dirilis 2017 [mencatat](#) bahwa 23,3 persen siswa SMA dan mahasiswa tidak percaya pada Pancasila, sedangkan hampir 23,4 persen mendukung jihad untuk menuju terwujudnya Negara Islam. Beberapa sekolah Muslim melarang siswanya berinteraksi dengan non-Muslim. Beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok keagamaan Salafi anti-pluralis [tumbuh](#) di banyak universitas di seluruh Indonesia. Pemerintah telah [berjanji untuk merevisi](#) kurikulum bidang studi agama dan melarang buku pelajaran yang menyebarkan intoleransi. Beberapa universitas telah membatasi jenis pakaian keagamaan yang dapat dikenakan mahasiswa dengan melarang cadar; Meskipun universitas mengklaim ini perlu untuk memerangi ekstremisme, tetapi langkah ini berpotensi melanggar hak individu untuk memilih cara mengamalkan keyakinannya.

Kelompok “Menyimpang”

Sekte-sekte Muslim minoritas—seperti Milah Ibrahim (atau dikenal sebagai Gafatar), Syiah, dan Ahmadiyah—terus menghadapi permusuhan sosial dan pelecehan negara di sepanjang 2019. MUI, sebagai lembaga quasi-pemerintah Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok-kelompok ini “menyimpang” dari Islam dan sesat. Pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah keluar dari Islam. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia melarang Ahmadiyah berdakwah, sebuah langkah yang [dikutuk secara terbuka](#) oleh mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid. Pada Januari 2019, sekelompok garis keras di Bandung [memprotes](#) diskusi tentang ajaran Ahmadiyah di sebuah masjid. Meskipun tetap dilanjutkan, tekanan itu membuat panitia memperpendek jalannya acara itu. Selain itu, di daerah lain

tertentu di Indonesia, seperti Lombok Timur, pemerintah daerah [tidak dapat menjamin](#) keselamatan jamaah Ahmadiyah.

KEBIJAKAN UTAMA AS

AS dan pemerintah Indonesia selama ini telah menjalin kerja sama erat di bidang kontraterorisme dan keamanan maritim, termasuk yang berkaitan dengan klaim teritorial pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tahun 1949, setelah merdeka dari Belanda, dan November 2019 [menandai](#) 70 tahun hubungan diplomatik. Pada bulan Agustus, delegasi kongres [mengunjungi](#) Jakarta membahas peluang perdagangan dan investasi. Pada bulan Juni, Duta Besar AS Joseph E. Donovan dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan [menyambut kepulangan](#) 88 siswa Indonesia yang berpartisipasi dalam program Pertukaran dan Studi Pemuda (YA) Departemen Luar Negeri untuk belajar di Amerika Serikat, di mana mereka belajar tentang toleransi dan keragaman. Sepanjang 2019, program Harmoni yang didanai USAID terus melanjutkan dukungan bagi lembaga dan masyarakat Indonesia yang aktif melawan bangkitnya ekstremisme kekerasan dan intoleransi agama dan mendorong nilai-nilai demokrasi yang toleran. Program MAJu USAID terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan juga tokoh masyarakat madani setempat untuk memperluas akses ke keadilan dan hak asasi manusia bagi agama dan etnis minoritas. USAID [meningkatkan](#) anggaran keseluruhan untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia sebesar \$3 juta, hingga senilai total \$93 juta. Selain itu, para diplomat AS [bertemu dengan](#) pejabat pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan masyarakat madani menggalang desakan agar secara terbuka mengutuk pemerintah Tiongkok yang menahan lebih dari satu juta Uighur dan Muslim lainnya.